



Jl. Sam Ratulangi No. 28/3, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang  
Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95111  
Telp/Fax : (0431) 825 838  
Laman : [www.sulut.bawaslu.go.id](http://www.sulut.bawaslu.go.id)  
Email : [set.sulut@bawaslu.go.id](mailto:set.sulut@bawaslu.go.id)

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**NOMOR : 007.1/HK.06/K.SA/01/2026**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan

informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan

- Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  - h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
  - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
  - e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
  - f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;

- g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
- i. Evaluasi dan pelaporan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;

**KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado,

Pada Tanggal : 05 Januari 2026

  
**DR. ARDILES M. R. MEWOH**  
KETUA

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara  
Nomor : 007.1/HK.06/K.SA/01/2026  
Tanggal : 20 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA**

| No  | Nama                             | Jabatan                                                 | Kedudukan             |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Dr. Ardiles M. R. Mewoh          | Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara                   | Pembina               |
| 2.  | Donny Rumagit, S.TP, SH          | Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara                 | Pembina               |
| 3.  | Zulkifli Densi, S.Pd, M.H        | Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara                 | Pembina               |
| 4.  | Steffen S. Linu, SS.,M.AP        | Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara                 | Pembina               |
| 5.  | Erwin F. Sumampouw,<br>S.P.,M.AP | Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara                 | Pembina               |
| 6.  | Aldrin Christian                 | Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi<br>Sulawesi Utara   | Penanggung<br>Jawab   |
| 7.  | Yenne Janis, SH., MH             | Kepala Bagian P3SPH Bawaslu Provinsi<br>Sulawesi Utara  | Ketua/<br>Verifikator |
| 8.  | Olivia S. N Kembie, SH., MH      | Analisis Hukum Ahli Pertama                             | Anggota               |
| 9.  | Nicky Londok, SAP                | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan<br>Umum ahli Pertama | Anggota               |
| 10. | Juninho Loa, SH                  | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan<br>Umum ahli Pertama | Anggota               |
| 11. | Hendri Tegila, SH                | Analisis Hukum Ahli Pertama                             | Anggota               |

  
**DR. ARDILES M. R. MEWOH**